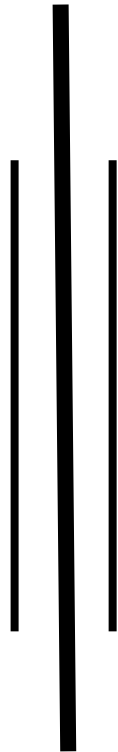


**PERUBAHAN RENCANA
KERJA (RENJA)
TAHUN 2025**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK**

Jl. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax. - KODE POS 23242

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

NOMOR: 065 / 733.1 / SK / 2025

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan, program, kegiatan, dan pendanaan pembangunan daerah Tahun 2025, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tentang penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2025.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679));
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh 2007-2027;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, dan
15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan hasil penyesuaian terhadap Rencana Kerja Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- KEDUA : Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh Tahun 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH

PADA TANGGAL : 24 Oktober 2025

2 Jumaddil Awal

**Pit.KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



Ir. MUHAMMAD ZUBIR, S.SiT., M.Si

Pembina Tk.I /

NIP. 19780816 200012 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga dapat menunaikan perintah-Nya serta diberikan kesempatan sebagai abdi negara untuk melayani masyarakat. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia.

Alhamdulillah dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan dokumen perubahan perencanaan berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 tahun berdasarkan adanya kebijakan penyesuaian yang diambil dalam pertimbangan antara perkembangan keadaan riil dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah yang memberikan dampak terhadap penetapan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Renja Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2025. Keadaan ini membuat Diskominfo perlu melakukan perubahan terhadap Renja Tahun 2025 dengan berpedoman pada Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhirnya dokumen Perubahan Renja Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2025 ini diharapkan bisa bermanfaat bagi berbagai pihak yang menggunakan, baik Pemerintah Kota Banda Aceh, Diskominfo Kota Banda Aceh sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFOTIK SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfotik Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfotik.....	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfotik	20
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISKOMINFOTIK	26
BAB IV PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah". Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah dimana Renja disusun melalui proses penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo tahun 2023-2026. Renja berisikan informasi dan panduan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam periode satu tahun. Renja dilengkapi dengan kerangka anggaran dan regulasi yang berlaku serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dana, sumber dana dan kelompok sasaran serta bagaimana pengorganisasian program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tupoksinya.

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh dilakukan berdasarkan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Perubahan Renja Diskominfo Kota

Banda Aceh Tahun 2025 perlu dilakukan dikarenakan pada hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Diskominfo dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan keadaan strategis dan rill, perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan sehingga diperlukan adanya penyesuaian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan oleh Diskominfo pada Tahun 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Diskominfo perlu melakukan perubahan prioritas dan konsentrasi kinerja yang mengakibatkan dibutuhkan perubahan atau penyesuaian pada dokumen Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2025 dengan berpedoman pada Peraturan yang berlaku.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam Penyusunan Perubahan Renja Diskominfo Kota Banda Aceh tahun 2025 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh 2007-2027;
- m. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- n. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;
- o. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, dan
- p. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2025 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program, kegiatan, sub kegiatan berdasarkan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah:

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, dan
3. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo Kota Banda Aceh yang mengarah pada pencapaian sasaran yang terdapat pada Rencana Strategis Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFOTIK SAMPAI
DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Tik Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan realisasi capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo Tik) Kota Banda Aceh sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran/sub keluaran yang direncanakan.

Ada 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan pada 11 (sebelas) kegiatan di dalam 5 (lima) program yang belum memenuhi target Renja dan Renstra Diskominfo Tik yaitu :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (0%)
 - 2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (0%)
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (16,67%)
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (20%)
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (0%)
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (0%)
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (20%)

- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (0%)
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel (0%)
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (0%)
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (8.33%)
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (16.67%)
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (0%)
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (0%)
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel (0%)
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (12.07%)
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (0%)
- b) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- 1) Kegiatan Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat (0%)
 - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (0%)
 - Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik (0%)
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (0%)

- Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik (0%)
 - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik (0%)
- c) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- 1) Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda (0%)
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi (0%)
 - Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (0%)
 - Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah (0%)
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (0%)
 - Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas (0%)
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (0%)
- d) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral (0%)
 - Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional (0%)
- e) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (0%)
- 2) Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (0%)
2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran/sub keluaran yang direncanakan.
- Ada 1 (satu) sub kegiatan pada 1 (satu) kegiatan di dalam 1 (satu) program yang telah memenuhi target Renja dan Renstra Diskominfo yaitu:
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (25%)
3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran/sub keluaran yang direncanakan;
- Ada 2 (dua) sub kegiatan pada 2 (dua) kegiatan di dalam 2 (dua) program yang telah memenuhi target Renja dan Renstra Diskominfo yaitu:
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (33.33 %)
- b) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- 1) Kegiatan Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Relasi Media (40%)

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;

Faktor penyebab belum tercapainya target pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dikarenakan oleh adanya kebijakan *refocusing* dan penghapusan anggaran yang diberikan serta kebijakan prioritasisasi anggaran untuk sub kegiatan yang dilakukan. Selain itu karena adanya kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat sehingga banyak aliran kas yang terlambat dilakukan pencairan anggarannya. Pada Program Informasi & Komunikasi Publik terdapat faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja diantara lain kebijakan *refocusing* dan penghapusan anggaran yang menyebabkan pelaksanaan sub kegiatan belum dilakukan, pembatasan kegiatan lapangan dan kebijakan SPD ketat sehingga realisasi target kinerja diharapkan dapat tercapai pada akhir semester 2 atau triwulan III dan IV. Pada Program Aplikasi Informatika terdapat faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja diantara lain kebijakan *refocusing* dan prioritasisasi anggaran yang diberikan sehingga menyebabkan adanya penghapusan anggaran dikarenakan oleh kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) Ketat. Untuk Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi belum mencapai target dikarenakan adanya pengalihan anggaran ke beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang lebih mendesak atau prioritas.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Secara keseluruhan keterkaitan yang timbul dengan pencapaian target capaian program Renstra yang belum sesuai adalah belum maksimalnya performa dan kinerja dari Diskominfo di dalam memenuhi target dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan. Hal ini sangat dipengaruhi dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya di atas seperti tidak tercapainya target capaian sasaran dan tujuan strategis yang terdapat pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada pada Renstra Diskominfo

dan menjadi tanggung jawab Diskominfo dikarenakan oleh kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) Ketat sehingga membuat adanya penetapan prioritas pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Selain itu adanya pembatasan kegiatan lapangan membuat jumlah pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan secara daring atau *online* semakin meningkat. Hal ini membuat Diskominfo harus menyesuaikan rencana dan strategi di dalam pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan, seperti memperkuat kemampuan diseminasi informasi secara digital melalui media daring, memperkuat layanan internet dan interkoneksi yang disediakan, mengikuti dan memahami pelaksanaan seminar online atau webinar terkait dengan pemenuhan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan lain-lain.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor tidak terserapnya anggaran pada beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah disebut di atas adalah dengan melakukan modifikasi serta prioritasasi target capaian kinerja beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang terkena *refocusing* anggaran, mengalihkan mata anggaran yang tidak terkena prioritas kepada program/kegiatan/sub kegiatan prioritas, memaksimalkan pelaksanaan tupoksi menggunakan teknologi IT secara *online* atau daring, tetap melaksanakan tupoksi Diskominfo walaupun adanya keterbatasan anggaran dengan cara penyesuaian rencana dan strategi dengan kolaborasi, elaborasi, koordinasi dan kerjasama dengan OPD, kementerian terkait dan juga para *stakeholder* lainnya. Selain itu dikarenakan adanya anggaran yang SPD-nya baru muncul di Semester II membuat Diskominfo harus menyiapkan segala hal yang dibutuhkan terkait dengan realisasi SPD tersebut, dikarenakan pada tahun 2025 ini banyak anggaran dan program baru yang diberikan kepada Diskominfo dalam rangka menyukseskan program 100 hari dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh sehingga dibutuhkan perencanaan, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dan *stakeholder* terkait.

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja (Renja) Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025
Sampai Dengan Triwulan I**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub Output)	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja 2025)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sd Triwulan I (sampai dengan Maret 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4		5		6 = 5/4*100%
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik						1,87
2					Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						1,87
2	16				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika						5,60
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%				8,79
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100%				25,00
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	dokumen	3	dokumen	25,00
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%				16,67
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Orang/Bulan	10	Orang/Bulan	33,33
2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	-	0	-	0,00
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%				0,00

2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	58	Paket	0	Paket	0,00
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%				7,33
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	1	Paket	16,67
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	20,00
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	0	Paket	0,00
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	0	Laporan	0,00
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%				0,00
2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	0	Unit	0,00
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18	Unit	0	Unit	0,00
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	0	Unit	0,00
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%				12,50
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1	Laporan	8,33
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2	Laporan	16,67
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%				2,41

2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	0	Unit	0,00
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	0	Unit	0,00
2	16	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	13	Unit	0	Unit	0,00
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58	Unit	7	Unit	12,07
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0	Unit	0,00
2	16	02			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada masyarakat		<i>100%</i>			8,00
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat		<i>100%</i>			8,00
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	5	Laporan	2	Laporan	40,00
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1	Komunitas	0	Komunitas	0,00
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1	Permohonan	0	Permohonan	0,00
2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1	Rekomendasi	0	Rekomendasi	0,00
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1	Media	0	Media	0,00
2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00

2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	45	Orang	0	Orang	0,00
2	16	03			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika		100%			0,00
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan e-government yang dikelola		100%			0,00
2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1	Laporan	0	Laporan	0,00
2	16	03	2.02	0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00
2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00
2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3	Aplikasi	0	Aplikasi	0,00
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	44	Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah	0,00
2	16	03	2.02	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	1	Program	0	Program	0,00
2	16	03	2.02	0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1	dokumen	0	dokumen	0,00
2	20				Urusan Pemerintahan Bidang Statistik						0,00
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya database statistik sektoral daerah		100%			0,00
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota		100%			0,00
2	20	02	2.01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	34	Orang	0	Orang	0,00
2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	68	Persentase	0	Persentase	0,00

2	21				Urusan Pemerintahan Bidang Persandian														0,00
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	<i>100%</i>												0,00
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana	<i>100%</i>												0,00
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Laporan	0	Laporan									0,00
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan	<i>100%</i>												0,00
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	44	Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah									0,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo

Capaian kinerja pelayanan Diskominfo Kota Banda Aceh dapat dihitung berdasarkan capaian target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Diskominfo yang telah tertuang dalam Renstra Diskominfo, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja, percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik yang prima di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Untuk mendukung capaian tersebut Diskominfo Kota Banda Aceh merujuk pada delapan indikator tingkat kinerja pelayanan. Indikator pertama yaitu Persentase data Statistik Sektorial Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu ditargetkan mencapai 31%, dimana capaian pelaksanaannya sampai dengan Triwulan I 2025 sudah mencapai 7,75%. Indikator kedua yaitu Persentase website OPD yang aktif ditargetkan mencapai 86%, dimana capaian pelaksanaannya sampai dengan Triwulan I 2025 sudah mencapai 21,5%. Indikator ketiga yaitu Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan ditargetkan mencapai 61%, dimana capaian pelaksanaannya sampai dengan Triwulan I 2025 sudah mencapai 15,25%. Indikator keempat yaitu Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan ditargetkan mencapai 100%, indikator kelima yaitu Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi ditargetkan mencapai status "Ada", indikator keenam yaitu Buku "Kabupaten dalam Angka" ditargetkan mencapai status "Ada", indikator ketujuh yaitu Buku "PDRB" ditargetkan mencapai status "Ada", indikator terakhir atau kedelapan yaitu Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah ditargetkan mencapai 34% dari total jumlah OPD. Indikator keempat sampai dengan indikator kedelapan hasilnya belum bisa diprediksi dikarenakan baru bisa diukur pada akhir tahun pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yaitu pada triwulan IV.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dapat dilihat lebih detail pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025
Sampai Dengan Triwulan I**

NO	INDIKATOR	Target Kinerja Capaian Renstra 2025		Realisasi Kinerja Capaian Renstra sampai dengan Triwulan I (sampai dengan Maret 2025)		CATATAN ANALISIS
1	2	3		4		5
1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	31	%	7,75	%	Tercapai
2	Persentase website OPD yang aktif	86	%	21,5	%	Tercapai
3	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	61	%	15,25	%	Tercapai
4	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100	%	0	%	Pencapaian kinerja baru bisa diukur pada akhir tahun pelaksanaan rencana kerja dan anggaran
5	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada	Ada	0	Ada	Pencapaian kinerja baru bisa diukur pada akhir tahun pelaksanaan rencana kerja dan anggaran
6	Buku "Kabupaten dalam Angka"	Ada	Ada	0	Ada	Pencapaian kinerja baru bisa diukur pada akhir tahun pelaksanaan rencana kerja dan anggaran
7	Buku "PDRB"	Ada	Ada	0	Ada	Pencapaian kinerja baru bisa diukur pada akhir tahun pelaksanaan rencana kerja dan anggaran
8	Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	40	%	0	%	Pencapaian kinerja baru bisa diukur pada akhir tahun pelaksanaan rencana kerja dan anggaran

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian pada Pemerintah Kota Banda Aceh, Diskominfo telah menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan kerja yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tugas pokok dan fungsi serta upaya pencapaian tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2023-2026. Dalam RPD tersebut, Diskominfo mendukung pencapaian tujuan RPD Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu “Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah” dengan Sasaran “Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah”.

Mendukung capaian misi tersebut Diskominfo Kota Banda Aceh merujuk pada 8 (delapan) indikator tingkat kinerja pelayanan yang harus diraih. Dari 8 indikator pencapaian kinerja pelayanan Diskominfo seperti yang bisa dilihat pada Tabel 2.2, realisasi capaian 8 indikator pada triwulan I tahun 2025 terdapat 3 indikator yang mencapai target yang telah ditetapkan, dimana 3 indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo Kota Banda Aceh. Persentase capaian realisasi target kinerja indikator pertama yaitu Persentase data Statistik Sektorial Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu dihitung dengan formula $\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$ dan melihat kepada capaian atau realisasi kinerja pada triwulan I tahun 2025 yang dibagi dengan target yang sudah ditetapkan, indikator kinerja ini sudah mencapai target realisasi kinerja yang diharapkan yaitu 7,75%. Persentase capaian realisasi target kinerja indikator kedua yaitu Persentase Website OPD yang Aktif sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 21,5%, dimana target pencapaian dari Website OPD yang Aktif adalah sebesar 86% dari semua website OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dimana angka dan data ini diperoleh dengan perhitungan

formula $\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$. Persentase capaian realisasi target kinerja indikator ketiga yaitu Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Triwulan I tahun 2024 yaitu sebesar 15,25% dimana target pencapaian Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebesar 61% dimana angka ini diperoleh dengan perhitungan formula $\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$. Namun terdapat 5 indikator yang tidak tercapai target yang telah ditetapkan dikarenakan beberapa hal seperti tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung ketercapaian target indikator kinerja pelayanan, pengalihan prioritas Diskominfo untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang dihadapi serta kurangnya sarana dan prasarana di dalam mencapai target indikator pelayanan tersebut..

Untuk mencapai target indikator sebagaimana disebutkan sebelumnya ada beberapa permasalahan dan hambatan yang timbul diantaranya yaitu :

1. Belum memadainya fasilitas diseminasi (penyebarluasan) informasi publik;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan bidang yang ada;
3. Sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum memadai;
4. Pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Rendahnya komitmen prioritas di dalam pengelolaan TIK;
6. Belum baiknya pengelolaan data sektoral yang tervalidasi;
7. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral kota Banda Aceh;
8. Masih rendahnya kesadaran keamanan data dan informasi yang dimiliki;
9. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR);

10. Belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas Command Center di dalam konsep Smart City, dan
11. Pengalihan prioritas Diskominfo untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dimana terdapat kebijakan rasionalisasi anggaran yang diberikan.

Permasalahan dan hambatan di atas tentunya akan berdampak pada terhambatnya pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kontribusinya pada capaian program nasional seperti RPJMN (dimana Diskominfo berperan pada Transformasi Digital) dan SDGs. Khusus untuk SDGs, dari 17 tujuan (*goals*) yang ingin dicapai, dari ketiga permasalahan dan hambatan di atas diperkirakan akan berdampak pada tujuan ke-7 (Energi Bersih dan Terjangkau), ke-9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur), dan tujuan ke-11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan).

Untuk meningkatkan pelayanan komunikasi, informasi dan statistik serta persandian sebagai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfo Kota Banda Aceh ada beberapa tantangan serta peluang yang harus dihadapi yaitu :

1. Tantangan

- Konsistensi penerapan regulasi terkait dengan tupoksi Diskominfo terutama dengan perubahan Kementerian Informasi dan Komunikasi menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital;
- Terbitnya beberapa regulasi baru terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (seperti peraturan SPBE, Peraturan Satu Data, Peraturan Informasi Publik, SP4N-LAPOR, dll);
- Evaluasi rencana induk pengembangan TIK;
- Tuntutan perencanaan bidang komunikasi, informatika dan statistik yang berkualitas;
- Adanya kekayaan potensi bidang komunikasi, informatika dan statistik yang belum tergarap secara maksimal;
- Pengelolaan keamanan data dan informasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- Keterpaduan pengelolaan arsitektur dan sarana prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, dan

- Pengelolaan informasi publik dan penyerapan aspirasi serta pengaduan masyarakat.

2. Peluang

- Adanya pembaharuan regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di bidang Informasi dan Teknologi, Komunikasi Publik, Statistik dan Persandian;
- Pesatnya kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Keberadaan infrastruktur TIK Kota yang cukup memadai.

Berdasarkan tupoksi pelayanannya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dihadapkan pada beberapa isu penting, yaitu:

- Meningkatkan koordinasi dan peran masing-masing tim teknis yang terlibat di dalam tata kelola TIK Pemerintah Kota Banda Aceh untuk optimalisasi SPBE;
- Meningkatkan kualitas pengelolaan data statistik sektoral melalui kolaborasi dengan para stakeholder, terutama Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kota, pemenuhan dataset statistik sektoral yang diperlukan, serta implementasi sistem satu data Banda Aceh;
- Memaksimalkan pengelolaan layanan pengaduan masyarakat melalui kanal SP4N-LAPOR dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pengelola layanan dan masyarakat serta mengoptimalkan pengembangan sistem informasi teknologi yang terintegrasi di dalam pengelolaan informasi publik;
- Memaksimalkan kualitas fasilitas *Command Center* yang berfungsi di dalam kesinambungan Kota Banda Aceh sebagai kota Smart City, dan
- Memaksimalkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui tertib administrasi dokumen dan juga SDM yang dimiliki

Formulasi di dalam menyikapi isu-isu di atas, Diskominfo Kota Banda Aceh akan menempuh beberapa hal diantaranya, yaitu:

1. Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral serta perkuat kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait;
2. Melakukan penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas;
3. Meningkatkan koordinasi dan peran dari seluruh Tim Teknis yang terkait dengan tata kelola TIK Pemerintah Kota Banda Aceh;
4. Melakukan pengembangan kapasitas SDM TIK dan Statistik serta Persandian;
5. Memaksimalkan pengelolaan layanan pengaduan masyarakat melalui kanal SP4N-LAPOR dan update informasi diseluruh website OPD;
6. Memaksimalkan kualitas fasilitas Command Center dan seluruh perangkat pendukungnya (CCTV, dll) yang berfungsi di dalam kesinambungan konsep Smart City
7. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi.
8. Melakukan pengembangan SDM terkait TIK dan statistik sektoral melalui sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), pendidikan dan latihan (diklat), pembinaan dan lain-lain;
9. Memperkuat fokus dan pemahaman serta melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi SP4N-LAPOR sebagai sarana pengaduan masyarakat Kota Banda Aceh;
10. Melakukan prioritas anggaran terkait dengan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK dan informasi publik serta data sektoral yang telah dimiliki;
11. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sistem Satu Data Banda Aceh;

12. Memperkuat komitmen pimpinan dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap penerapan SPBE di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh;
13. Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku serta melakukan evaluasi berkala dan berkelanjutan, dan
14. Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISKOMINFOTIK

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 diperlukan rangkaian strategi dan kebijakan dimana untuk mewujudkan strategi dan kebijakan tersebut dibutuhkan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan yang memadai.

Diskominfo menetapkan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan pada Renja tahun 2025 dengan jumlah pagu anggaran total sebanyak Rp 11.494.510.397,-. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kali perubahan anggaran dimana hal ini dilakukan sebagai strategi dan kebijakan untuk menyikapi adanya perubahan situasi dan kondisi yang terjadi dimana hal ini kemudian dimasukkan ke dalam Perubahan Renja Tahun 2025. Perubahan Renja tahun 2025 menetapkan Diskominfo akan melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran total sebanyak Rp 22.232.387.455,-. Rincian perubahan program, kegiatan, sub kegiatan, target dan pagu pada Perubahan Renja tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian KinerjaDan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
			Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
(1)	(2)	(3)											
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik												
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				11.494.510.397	15.821.663.157	22.232.387.455						
2	16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				10.897.486.397	15.729.859.857	22.153.994.155					
2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%	100%	7.862.201.197	7.139.331.457	6.728.992.655	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	

2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100%		0%	48.734.800	18.009.800	14.027.100	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampong Baru		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan		
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	dokumen	15	dokumen	48.734.800	18.009.800	14.027.100	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampong Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	ASN Diskominformatik
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		100%	4.287.838.893	3.969.871.255	3.969.934.855	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampong Baru		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan		

2	1	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Orang/Bulan	30	Orang/Bulan	4.287.838.893	3.969.871.255	3.969.934.855	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	DAU	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	ASN Diskominfo tik
2	1	0	2.	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	0	Dokumen	-	-	-	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	DAU	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	ASN Diskominfo tik
2	1	0	2.	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		0%		31.900.000	31.900.000	-	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	

2	1	0	2.	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	58	Paket	0	Paket	31.900.000	31.900.000	-	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	ASN Disko minfo tik
2	1	0	2.	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%		315.758.404	117.360.202	69.551.300	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	
2	1	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	12	Paket	5.855.000	5.853.900	2.923.100	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	ASN Disko minfo tik

2	1	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	12	Paket	38.108.000	23.834.800	11.914.500	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	ASN Disko minfo tik
2	1	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	12	Paket	12.628.000	12.627.800	4.713.700	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	ASN Disko minfo tik
2	1	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	Dokumen	0	Dokumen	1.080.000	-	-	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	ASN Disko minfo tik

2	1	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	15	Laporan	258.087.404	75.043.702	50.000.000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	ASN Diskominfo tik
2	1	0	2.	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%		0%		332.496.000	436.982.300	200.000.000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	
2	1	0	2.	00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	0	Unit	-	-	-	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	ASN Diskominfo tik

2	161	207	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18	Unit	0	Unit	24.852.000	-	-	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampong Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	ASN Disko minfo tik
2	161	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	5	Unit	307.644.000	436.982.300	200.000.000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampong Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	ASN Disko minfo tik
2	161	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%		2.597.490.500	2.327.361.300	2.202.196.800	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampong Baru		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	

2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	972.038.000	972.038.000	972.038.000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	ASN Disko minfo tik
2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	1.625.452.500	1.355.323.300	1.230.158.800	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	ASN Disko minfo tik
2	1	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%		247.982.600	237.846.600	273.282.600	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	

2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	5	Unit	112.176.000	179.882.600	234.360.600	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kumpang Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	ASN Disko minfo tik
2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	0	Unit	77.842.600	-	-	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kumpang Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	ASN Disko minfo tik
2	1	0	2.	00	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	13	Unit	0	Unit	-	-	-	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kumpang Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	ASN Disko minfo tik

2	1	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58	Unit	78	Unit	57.964.000	57.964.000	38.922.000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	ASN Diskominfo tik
2	1	0	2.	00	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	0	Unit	-	-	-	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	ASN Diskominfo tik
2	1	0			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada masyarakat	100%		100%		2.021.329.200	7.339.741.600	11.301.299.400	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	

2	162	201			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat	100%	100%	2.021.329.200	7.339.741.600	11.301.299.400	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampong Baru		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan		
2	162	201	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	5	Laporan	5	Laporan	1.467.500.000	6.987.069.600	7.974.525.400	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampong Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	Masyarakat Kota Banda Aceh
2	162	201	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1	Komunitas	0	Komunitas	292.234.000	-	-	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampong Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	Masyarakat Kota Banda Aceh

2	162	201	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1	Permohonan	12	Permohonan	26.680.000	26.607.900	34.491.900	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	Masyarakat Kota Banda Aceh
2	162	201	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1	Rekomendasi	12	Rekomendasi	22.115.000	22.114.800	29.998.800	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	Masyarakat Kota Banda Aceh
2	162	201	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1	Media	5	Media	134.332.200	303.949.300	3.262.283.300	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	Masyarakat Kota Banda Aceh

2	162	201	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1	Dokumen	0	Dokumen	27.844.000	-	-	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	Masyarakat Kota Banda Aceh
2	162	201	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	45	Orang	0	Orang	50.624.000	-	-	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	Masyarakat Kota Banda Aceh
2	163			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan infrastruktur dan Aplikasi Informatika		100%		100%	1.013.956.000	1.250.786.800	4.123.702.100	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	

2	163	202			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan e-government yang dikelola	100%		100%	1.013.956.000	1.250.786.800	4.123.702.100	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan		
2	163	202	0015		Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1	Laporan	1	Laporan	100.250.000	50.236.800	50.236.800	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh
2	163	202	0017		Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	178.150.000	178.150.000	244.133.300	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh

2	163	202	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1	Dokumen	0	Dokumen	-	-	-	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh
2	163	202	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3	Aplikasi	1	Aplikasi	217.850.000	68.350.000	183.850.000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh
2	163	202	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	44	Perangkat Daerah	44	Perangkat Daerah	252.460.000	954.050.000	3.645.482.000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh

2	163	202	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	1	Program	0	Program	71.309.000	-	-	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kumpang Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh
2	163	202	0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1	dokumen	0	dokumen	193.937.000	-	-	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kumpang Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh
2	20			Urusan Pemerintahan Bidang Statistik						191.367.000	39.816.700	38.806.700					
2	202			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya database statistik sektoral daerah	100%		100%		191.367.000	39.816.700	38.806.700	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kumpang Baru		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	

2	2	0	2	2.	0	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	100%	100%	191.367.000	39.816.700	38.806.700	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kumpang Baru	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan						
2	2	0	2	2.	0	1	00	07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	34	Orang	0	Orang	-	-	-	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kumpang Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh
2	2	0	2	2.	0	1	00	08	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	68	Persentase	68	Persentase	191.367.000	39.816.700	38.806.700	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kumpang Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh

2	2					Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					405.657.000	51.986.600	39.586.600						
2	2	0				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				405.657.000	51.986.600	39.586.600	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampong Baru	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan			
2	2	0	2			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana				100%	100%	405.657.000	51.986.600	39.586.600	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampong Baru	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	
2	2	0	2	2.0	00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Laporan	1	Laporan	405.657.000	51.986.600	39.586.600	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampong Baru	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh

2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan	100%	0%							Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan		
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	44	Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah						Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	PAD Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Invetasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh

BAB V

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun ini merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh pada Tahun 2025. Penyusunan Perubahan Renja lebih bersifat operasional sebagai kebijakan penyesuaian yang diambil dalam pertimbangan antara perkembangan keadaan riil dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah yang memberikan dampak terhadap penetapan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran strategis dan juga untuk mencapai tujuan sehingga misi dan visi Diskominfo Kota Banda Aceh yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah Kota Banda Aceh di dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Dokumen Perubahan Renja Diskominfo Tahun 2025 diharapkan bisa menjelaskan arah pelayanan Diskominfo yang tertuang di dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan atau kebutuhan anggaran yang telah disesuaikan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo tahun 2023-2026 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Catatan penting yang harus diperhatikan di dalam perubahan ini adalah dilakukannya

kebijakan tindakan *refocusing* anggaran prioritas dan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat terhadap anggaran yang diberikan sangat mempengaruhi keadaan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga di dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik pada Tahun 2025 akan dilakukan kebijakan prioritasasi agar didapatkan capaian kinerja yang lebih terukur.

Hal-hal penting lainnya yang diharapkan menjadi pertimbangan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang di dalam Perubahan Renja Diskominfotik Tahun 2025 ini adalah :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kinerja Diskominfotik;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada;
3. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, elaborasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi di dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh agar tercipta hubungan kerjasama yang sinergis dalam rangka mendukung pencapaian RPD Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

Demikianlah Dokumen Perubahan Renja Diskominfotik Tahun 2025 ini kami susun dimana kami menyadari bahwa dokumen ini masih diperlukan adanya saran dan masukan dari berbagai pihak untuk tercapainya penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Banda Aceh, 24 Oktober 2025
Pt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH



Ir. MUHAMMAD ZUBIR, S.SiT., M.Si.
Pembina Tk.I / NIP.197808162000121001